

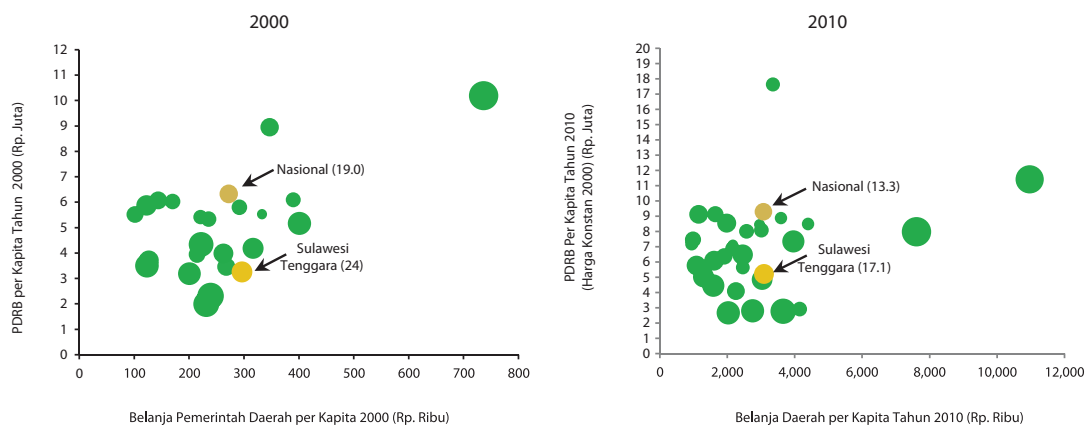


# Ringkasan Eksekutif

**Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam.** Sebagai provinsi kepulauan, Sulawesi Tenggara dikaruniai kekayaan sumberdaya laut yang cukup besar, selain itu Sulawesi Tenggara juga terkenal dengan kekayaan sumberdaya mineral berupa nikel dan aspal. Jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara mencapai 2,2 juta jiwa pada tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk diatas angka nasional. Jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara telah berkembang lebih dari 2 kali lipat, dari 4 kabupaten dan 1 kota sebelum desentralisasi menjadi 10 kabupaten dan 2 kota dalam 7 tahun desentralisasi.

**Sulawesi Tenggara merupakan provinsi berkembang dengan sejumlah tantangan.** Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Indonesia, namun sampai tahun 2010, kontribusi perekonomian Sulawesi Tenggara terhadap perekonomian nasional masih kecil (0,6 persen). Sejak desentralisasi, PDRB per kapita Sulawesi Tenggara secara riil tumbuh 6 persen per tahun, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (4,7 persen per tahun), namun pertumbuhan tersebut belum mampu menempatkan PDRB per kapita riil Sulawesi Tenggara di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga telah berhasil diturunkan sebesar 6,8 basis poin dibanding sebelum desentralisasi (2000), lebih cepat dibanding penurunan tingkat kemiskinan nasional pada periode yang sama (5,6 basis poin), namun tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara tahun 2010 masih diatas tingkat kemiskinan nasional. Belanja pemerintah daerah per kapita juga meningkat lebih dari 9 kali lipat dibanding sebelum desentralisasi, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan.

**Gambar 1. Sulawesi Tenggara Merupakan Salah Satu Provinsi Berkembang di Indonesia**



Sumber: Diolah dari BPS dan DJPK Kementerian Keuangan, 2011.

Catatan: Besaran lingkaran dan angka dalam kurung menunjukkan tingkat kemiskinan. Untuk memperjelas ilustrasi, Provinsi DKI Jakarta, Riau (tahun 2000), Kepulauan Riau (Tahun 2010), dan Kalimantan Timur tidak dimasukkan ke dalam gambar. Tingkat kemiskinan nasional didasarkan pada angka nasional, sementara angka PDRB per kapita riil dan belanja daerah per kapita nasional didasarkan pada angka rata-rata provinsi.

## Tantangan, Kendala, dan Peluang Perekonomian

**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen merupakan tantangan perekonomian Sulawesi Tenggara.** Dalam rangka meningkatkan PDRB per kapita serta memperbesar perannya dalam perekonomian nasional, Sulawesi Tenggara perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen yang sudah dicapai pada tahun 2010. Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain : (i) hampir sepertiga perekonomian Sulawesi Tenggara bertumpu pada sektor pertanian, namun sektor tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir (2009-2010); dan (ii) meskipun Sulawesi Tenggara terkenal cukup kaya dengan sumber daya mineral, namun sumberdaya tersebut belum berdampak signifikan terhadap perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian secara riil masih kurang dari 6 persen dengan pertumbuhan produksi yang masih fluktuatif

dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, Sulawesi Tenggara memiliki peluang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni pesatnya pertumbuhan sektor tersier (terutama perdagangan) yang disertai dengan tingginya penyerapan tenaga kerja.

**Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara terhitung rendah, namun masih menghadapi tantangan pengangguran di perkotaan.** TPT di Sulawesi Tenggara jauh lebih rendah dibanding TPT nasional maupun dibanding rata-rata provinsi di Sulawesi. Namun demikian, TPT di daerah perkotaan masih sangat tinggi. Lebih dari 49 persen penganggur di Sulawesi Tenggara terpusat di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, sementara 51 persen lainnya tersebar di 10 kabupaten. Tingginya pengangguran di perkotaan didorong oleh tingginya migrasi ke perkotaan yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan lapangan kerja.

## Tantangan dalam Pembangunan Sosial

**Tingkat kemiskinan sudah berhasil diturunkan secara signifikan, namun masih perlu terus diupayakan.** Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara sudah berhasil diturunkan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Merujuk pada target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi, pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara harus dapat diturunkan menjadi 10 persen. Dengan pencapaian angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 14,6 persen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu mendorong penurunan angka kemiskinan setidaknya sebesar 2,3 basis poin persen per tahun dalam dua tahun ke depan (2012 dan 2013). Dengan keberhasilan penurunan kemiskinan sebesar 2,5 basis poin pada tahun 2011 (dari 17,1 persen (2010) menjadi 14,6 persen (2011)), target penurunan 2,3 persen kemiskinan pada dua tahun ke depan diharapkan bisa tercapai. Prioritas pengurangan kemiskinan perlu diarahkan terutama pada daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar seperti Kolaka, Muna, Buton, dan Konawe.

**IPM Sulawesi Tenggara belum beranjak dari peringkat ke-25 secara nasional dalam 5 tahun terakhir.** Indikator IPM yang paling bermasalah adalah indikator Angka Melek Huruf dan Angka Usia Harapan Hidup yang masih dibawah rata-rata nasional, sementara indikator Rata-rata Lama Sekolah sudah lebih baik dibanding angka nasional. Indeks Angka Melek Huruf cukup sulit mengalami peningkatan karena kasus buta aksara di Sulawesi Tenggara terjadi pada kelompok penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas). Faktor motivasi dan usia yang sudah memasuki masa non-produktif membuat upaya peningkatan angka melek huruf cukup terkendala. Sementara itu, tantangan dalam peningkatan angka harapan hidup terletak pada masih tingginya angka kesakitan penduduk<sup>1</sup> dan angka kematian bayi.

## Kinerja Pengelolaan Keuangan

**Secara umum, kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan pembenahan.** Survei kapasitas PKD bertujuan untuk memetakan kapasitas PKD seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Instrumen survei berupa *balance scorecard* terdiri dari 145 indikator yang diklasifikasi kedalam 9 bidang strategis PKD. Secara rata-rata, nilai kapasitas PKD kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara baru memenuhi 49 persen dari 145 indikator penilaian. Angka ini masih dibawah nilai provinsi yang sudah mencapai 60 persen. Dari 12 kabupaten/kota, 7 daerah masih dibawa nilai rata-rata kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara (49 persen). Kolaka Utara dan Kota Kendari adalah dua daerah yang sudah memiliki nilai diatas rata-rata kabupaten/kota lainnya, serta lebih baik dari nilai kapasitas PKD provinsi. Kelemahan Kapasitas PKD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tersebar di berbagai bidang, namun secara umum bidang akuntansi dan pelaporan merupakan bidang yang paling perlu perbaikan.

<sup>1</sup> Angka kesakitan penduduk adalah rasio jumlah penduduk yang mengalami sakit dibagi jumlah penduduk. Data berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

## Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah

**Porsi DAU sudah menunjukkan kecenderungan menurun, sementara porsi PAD sebaliknya.** Meskipun perkembangan DAU per tahun menunjukkan fluktuasi, porsi DAU terhadap pendapatan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota secara umum menurun pada periode 2007-2010. Hal sebaliknya terjadi pada kinerja PAD yang secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2007-2010. Pada tingkat provinsi, peran PAD sudah 46 persen pada tahun 2010, namun pada tingkat kabupaten/kota rata-rata masih dibawah 7 persen. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah kabupaten/kota masih memerlukan banyak pembenahan. Kapasitas mobilisasi PAD antar daerah menunjukkan variasi yang cukup tajam. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Wakatobi mampu menghasilkan Rp. 22 juta dari setiap Rp. 1 miliar PDRB, sementara Konawe Selatan dan Buton Utara hanya Rp. 6 juta. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari karakteristik ekonomi (besaran sektor formal dan informal, karakteristik lapangan usaha pembentuk PDRB di masing-masing daerah, dll), regulasi, kelembagaan, sampai kapasitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan.

**Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang kaya sumber daya mineral, namun hasil dari sumber daya tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah.** Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pendapatan Dana Bagi Hasil non pajak SDA dari tahun ke tahun meskipun aktivitas di sektor pertambangan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menerima DBH Non-pajak SDA sebesar Rp. 118 juta dari setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya, namun pada tahun 2010, setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya hanya menghasilkan Rp. 13 juta DBH Non-Pajak SDA. Kerangka regulasi serta sistem pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan perlu diperbaiki.

## Kinerja Belanja Pemerintah Daerah

**Pada tingkat provinsi, porsi belanja transfer (bantuan keuangan, dll) dan belanja modal meningkat dalam 3 tahun terakhir.** Peningkatan porsi belanja modal mengindikasikan adanya perubahan struktur yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana alokasi belanja modal dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan di sektor-sektor strategis (fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll). Sementara itu, peran belanja transfer pemerintah provinsi juga menunjukkan peningkatan, terutama karena terkait dengan program prioritas seperti pembebasan biaya operasional pendidikan (BOP), beasiswa, pelayanan kesehatan gratis, serta *block grant* ke desa. Tantangan dalam belanja transfer terletak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi.

**Pada tingkat kabupaten/kota, porsi belanja pegawai secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun.** Kecenderungan ini akan berdampak positif jika peningkatan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan belanja gaji pegawai fungsional (guru, dokter, penyuluh, dll.), dan sebaliknya akan menjadi sumber inefisiensi jika peningkatan porsi tersebut didominasi oleh peningkatan jumlah pegawai non-fungsional. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kecenderungan pertumbuhan belanja pegawai dilihat dari pertumbuhan jumlah dan komposisi pegawai.

**Belanja Pemerintahan Umum<sup>2</sup> masih merupakan alokasi terbesar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.** Sampai tahun 2010, porsi terbesar belanja pemerintah provinsi dialokasikan untuk sektor pemerintahan umum disusul oleh sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Khusus pada tahun 2011, terjadi sedikit perubahan komposisi belanja pemerintah provinsi dengan meningkatnya belanja kesehatan menjadi hampir 20 persen karena adanya pembangunan RSUD provinsi. Sementara itu pada

---

2 Belanja sektor pemerintahan umum atau administrasi umum dalam penelitian ini terdiri dari belanja urusan pemerintahan umum, urusan kepegawaian, serta urusan pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum, sektor pemerintahan umum meliputi institusi seperti sekretariat daerah, DPRD, Kepala Daerah/wakil kepala daerah, kecamatan, kelurahan (diluar desa) dll.

tingkat kabupaten/kota, porsi terbesar belanja untuk sektor pemerintahan umum disusul oleh pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian. Porsi belanja sektor pemerintahan umum perlu dirasionalisasi secara bertahap untuk memberi peluang peningkatan porsi yang lebih besar pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian).

**Baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sekitar 60 persen belanja sudah dialokasikan untuk belanja langsung.** Namun demikian, porsi belanja untuk program/kegiatan terkait administrasi perkantoran dan aparatur (rutin) dalam belanja langsung pemerintah provinsi masih cukup tinggi (sekitar 26 persen dari total belanja, atau sekitar 43 persen dari total belanja langsung). Angka ini lebih tinggi dibanding pada tingkat kabupaten kota (19 persen dari total belanja, atau sekitar 32 persen dari total belanja langsung)<sup>3</sup>. Porsi belanja administrasi dan aparatur dalam belanja langsung secara bertahap perlu dirasionalisasi untuk memberi porsi yang lebih besar pada program/kegiatan pembangunan.

## Kinerja dan Tantangan Sektor Strategis

### Kesehatan

**Belanja kesehatan pemerintah provinsi sudah mendekati 20 persen pada tahun 2011.** Pada tingkat provinsi, belanja kesehatan meningkat dari rata-rata dibawah 10 persen (pada periode 2007-2010) menjadi hampir 20 persen tahun 2011. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja modal untuk pembangunan RS provinsi yang baru. Meskipun kebutuhan belanja modal setelah pembangunan rumah sakit menurun, belanja sektor kesehatan provinsi diharapkan tidak sampai kurang dari 10 persen diluar belanja pegawai. Selain karena ke depan belanja kesehatan akan dibebani oleh belanja operasional dari rumah sakit yang baru, porsi belanja kesehatan di atas 10 persen (diluar belanja pegawai) merupakan tuntutan dari Undang-Undang Kesehatan (lihat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 Ayat 2),

**Belanja Langsung Kesehatan tingkat kabupaten/kota cenderung menurun dan sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja program terkait administrasi/aparatur.** Belanja program terkait administrasi dan aparatur tingkat kabupaten/kota secara proporsional cenderung meningkat hingga mencapai 30 persen tahun 2011. Penurunan belanja langsung berdampak buruk pada komposisi program sektor kesehatan karena cenderung berdampak pada berkurangnya program/kegiatan urusan wajib ketimbang mengurangi belanja program/kegiatan terkait administrasi perkantoran/aparatur. Alokasi kedua terbesar dalam belanja langsung kesehatan adalah untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas disusul oleh program upaya kesehatan masyarakat.

**Kinerja pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami perbaikan, namun belum berdampak pada perbaikan indikator *Outcomes*.** Perkembangan capaian kinerja kesehatan di Sulawesi Tenggara menunjukkan terjadinya *paradox* antara membaiknya *output* sektor kesehatan (berupa fasilitas pelayanan kesehatan) di satu sisi, dan belum terjadinya perbaikan *outcomes* kesehatan ( angka kesakitan, AKB<sup>4</sup>, AKABA, kasus kematian ibu) di sisi lain. Keterputusan hubungan ini diperkirakan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; kesadaran atau kemauan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan; serta masih minimnya program-program yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

3 Belanja program/kegiatan administrasi umum perkantoran dan aparatur (rutin) adalah belanja program dengan kode 1 sampai 14 dalam belanja langsung masing-masing SKPD, atau sering juga disebut belanja SKPD. Belanja ini pada umumnya dianggarkan oleh SKPD untuk belanja ATK perkantoran, pemeliharaan atau pembangunan gedung perkantoran pemerintah, pelatihan dan peningkatan disiplin pegawai, dll.

4 AKB = Angka Kematian Bayi per 1,000 kelahiran hidup, AKABA=Angka Kematian Balita per 10,000 kelahiran hidup)

**Meskipun pada skala provinsi berbagai rasio fasilitas maupun tenaga kesehatan per penduduk sudah mengalami perbaikan, namun masih diwarnai kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota.** Dua kabupaten yang baru mekar (Buton Utara dan Konawe Utara) masih belum memiliki RSUD. Meskipun di beberapa daerah sudah terdapat rumah sakit, namun rasio tempat tidur RS per penduduk masih timpang. Rasio ketersediaan Puskesmas, Pustu dan tenaga kesehatan pada skala provinsi sudah cukup baik, namun pada tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan. Peran pemerintah provinsi diperlukan dalam mendorong pengurangan ketimpangan rasio fasilitas dan tenaga kesehatan antar kabupaten/kota.

## Pendidikan

**Setidaknya sejak tahun 2009, diperkirakan sebagian besar belanja pendidikan pemerintah provinsi dialokasikan melalui transfer (bantuan keuangan, hibah, dll).** Proporsi belanja pendidikan provinsi meningkat hingga 12 persen tahun 2009, namun kembali menurun hingga 4 persen pada tahun 2011. Penurunan belanja pendidikan dalam dua tahun terakhir diperkirakan karena sebagian besar belanja pendidikan provinsi dialokasikan melalui belanja bantuan kependidikan seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), beasiswa, dll. Program-program tersebut merupakan program prioritas pemerintah provinsi periode 2008-2013. Sampai penelitian ini berakhir, data tahunan mengenai hal tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga analisis belanja pendidikan pada penelitian ini hanya didasarkan pada belanja urusan terkait pendidikan (pendidikan, perpustakaan, dan pemuda/olahraga). Angka tersebut lebih kecil dari yang sebenarnya. Publikasi data terkait bantuan pendidikan perlu dilakukan setiap tahun terutama untuk memberikan kesadaran publik tentang komitmen pemerintah provinsi terhadap pendidikan.

**Belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi.** Pada tahun 2009, Buton mampu mengalokasikan lebih dari 40 persen belanjanya untuk sektor pendidikan, sementara Konawe Utara masih kurang dari 10 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah sebagai penerima manfaat (*main beneficiaries*) sektor pendidikan, belanja pendidikan Kota Bau-Bau mencapai Rp. 3,7 juta per penduduk usia sekolah, sementara Kabupaten Konawe masih kurang dari Rp. 1 juta per penduduk usia sekolah meskipun alokasi belanjanya sudah lebih dari 20 persen. Gambaran ini terjadi pada tahun 2009, variasi antar kabupaten/kota yang berbeda mungkin terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

**Secara umum, kinerja pendidikan di Sulawesi Tenggara cukup baik, namun masih perlu terus dilakukan pembenahan.** Indikator rata-rata lama sekolah di Sultra sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional. Namun demikian beberapa hal masih perlu diperbaiki misalnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK masih cukup tinggi; angka melanjutkan sekolah terutama dari tingkat SMP ke SMA/SMK masih rendah; APM terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kinerja pendidikan di Sulawesi Tenggara belum mampu menyumbang pada peningkatan IPM karena masih rendahnya angka melek huruf.

**Tantangan pelayanan pendidikan di Sulawesi Tenggara terletak pada pemerataan serta peningkatan kualitas fasilitas maupun guru.** Rasio siswa per guru di Sulawesi Tenggara sudah lebih kecil dibanding rasio nasional. Hal yang sama terlihat pada rasio siswa per sekolah dan siswa per kelas yang relatif lebih rendah dibanding nasional. Namun demikian, kesenjangan masih cukup tinggi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, satu kelas SD di Konawe Utara hanya menampung 20 siswa, sementara di Kolaka dan Kendari bisa dua kali lipatnya (40 siswa/rombongan belajar). Padahal SPM menentukan satu rombongan di SD paling banyak terdiri dari 32 siswa. Selain itu satu guru di Konawe melayani 11 siswa, sementara di Buton 20 siswa. Persentase kelas rusak masih cukup tinggi, terutama pada tingkat SD. Dari sisi kualitas, persentase guru yang memiliki ijazah tertinggi S1 atau lebih tinggi masih minim, padahal merujuk pada SPM sektor pendidikan, di setiap SD/MI setidaknya harus tersedia dua orang guru dengan ijazah S1 atau bersertifikat pendidik.

## Infrastruktur

**Struktur belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, namun total belanja infrastruktur masih fluktuatif.** Rata-rata lebih dari 75 persen belanja infrastruktur sudah dialokasikan untuk belanja langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan sebagian besar dari belanja langsung tersebut dialokasikan untuk belanja modal. Namun demikian, secara total, belanja infrastruktur masih fluktuatif. Meskipun tidak perlu signifikan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu menyusun skema/proyeksi peningkatan belanja infrastruktur yang lebih konsisten disesuaikan dengan kerangka pengeluaran jangka menengah yang lebih terarah.

**Beberapa tantangan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur dasar, irigasi, serta pembangunan jalan.** Perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kesehatan. Tantangan infrastruktur dasar perumahan di Sulawesi Tenggara adalah masih rendahnya akses terhadap listrik, air bersih, maupun sanitasi yang layak terutama pada rumah tangga termiskin dan miskin. Irigasi merupakan salah satu bidang ke-PU-an yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Seiring dengan peningkatan luas area sawah pada tahun 2010, tantangan pemerintah daerah untuk membangun irigasi teknis semakin tinggi. Dalam mendorong peningkatan produktivitas padi, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan cakupan irigasi teknis terutama pada area sawah tadah hujan yang sampai tahun 2010 masih sekitar 22,4 ribu hektar. Koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan irigasi sesuai kewenangannya (primer, sekunder, tersier).

**Panjang jalan provinsi per luas wilayah masih dibawah rata-rata nasional.** Pada tahun 2009, panjang jalan provinsi masih sekitar 488,8 km.<sup>5</sup> Jika dibandingkan dengan luas wilayah, panjang jalan provinsi di Sulawesi Tenggara masih sekitar 1,3 km per 100 km<sup>2</sup>. Angka ini masih dibawah rata-rata jalan provinsi secara nasional yang sudah mencapai 2,5 km per 100 km<sup>2</sup>. Sementara itu, rasio panjang jalan nasional dan panjang jalan kabupaten/kota per luas wilayah di Sulawesi Tenggara relatif sudah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional. Dalam rangka mendukung MP3EI (Masterplan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia), jalan merupakan sarana yang sangat penting baik untuk kepentingan peningkatan konektivitas wilayah, terutama dalam mendukung potensi ekonomi unggulan yang tidak hanya menjadi unggulan Sulawesi Tenggara secara nasional, tapi juga potensi ekonomi unggulan Indonesia secara internasional (Kakao dan Nikel).

## Pertanian

**Belanja pertanian di Sulawesi Tenggara masih dibawah 7 persen baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.** Pada tahun 2011 Belanja pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun sebagian besar bersumber dari dana dekonsentrasi, sementara belanja pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan belanja sektor pertanian yang bersumber dari dekonsentrasi/TP tahun 2011 hanya bersifat sementara dan diperkirakan akan berkurang seiring dengan perubahan prioritas dan program dari pemerintah pusat. Sebagai provinsi yang bermaksud meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sektor pertanian, alokasi 7 persen masih belum memadai. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu menyusun skema peningkatan belanja sektor pertanian yang lebih konsisten sehingga total investasi publik di sektor pertanian di Sulawesi Tenggara lebih stabil.

5 Dokumen Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2011 mencatat panjang jalan sampai tahun 2009 dengan panjang, jenis permukaan, serta kondisi jalan provinsi yang belum mengalami perubahan. Berdasarkan informasi dari Bappeda Provinsi, pada tahun 2010 telah terjadi penambahan panjang jalan provinsi dari 488,86 km (tahun 2009) menjadi 906,09 km (2010). Penambahan jalan tersebut sebagian berasal dari pengalihan jalan nasional menjadi jalan provinsi.

**Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dengan pertumbuhan yang semakin lamban.** Perlambatan pertumbuhan sektor pertanian di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh penurunan angka pertumbuhan riil di hampir semua sub-sektor (perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan/kelautan). Revitalisasi perlu dilakukan dengan prioritas pada peningkatan produksi, produktivitas, serta strategi pemasaran produk unggulan pertanian (Kakao, Padi, Sapi, dan Rumput Laut). Keempat komoditi unggulan tersebut merupakan komoditi dengan kontribusi terbesar pada sub-sektor masing-masing (Kakao terhadap perkebunan, padi untuk tanaman pangan, sapi untuk peternakan, dan rumput laut untuk perikanan dan kelautan). Peningkatan produksi pada keempat komoditi tersebut dapat berdampak pada pemulihan pertumbuhan sub-sektor dan pada akhirnya sektor pertanian secara luas.

### **Block Grant**

**Block grant ke desa merupakan salah satu dari tiga pilar utama program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat).** Pada tahun 2008, Gubernur Sulawesi Tenggara mencanangkan program Bahteramas dimana Program *block grant* merupakan salah satu prioritas dalam dalam program tersebut. Untuk merealisasikan program Bahteramas yang terkait dengan *block grant*, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah dana yang sebagian besar berada pada pos belanja transfer, yakni dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Alokasi *block grant* bersifat sama untuk semua desa tanpa memperhitungkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dll.

**Respons masyarakat cukup tinggi dan perlu disertai komitmen pemerintah provinsi yang lebih besar** Berdasarkan hasil survei, tingkat pengetahuan masyarakat tentang program *block grant* cukup tinggi; tingkat pemahaman masyarakat juga sudah baik; partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari *block grant* sudah mulai terjadi di beberapa desa; serta persepsi masyarakat tentang manfaat *block grant* sudah positif. Kondisi ini merupakan prasyarat penting bagi suksesnya sebuah program. Plafon pemerintah provinsi untuk dana bantuan keuangan pemerintah desa perlu ditingkatkan sehingga penyaluran *block grant* bisa lebih mendekati jumlah yang direncanakan (Rp. 100 juta per desa per tahun). Pembinaan untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang akan didanai *block grant* perlu diintensifkan. Pembinaan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *block grant* dapat berkontribusi bagi lancarnya proses pencairan dana dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendampingan realisasi *block grant* di tingkat desa perlu dilakukan misalnya melalui penyediaan fasilitator pendamping *block grant* untuk desa/kelurahan

### **Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender**

**Kesenjangan capaian pembangunan yang dinikmati oleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Sulawesi Tenggara masih merupakan persoalan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah.** Berdasarkan perbandingan indikator-indikator IPM dan IPG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tiga dari empat indikator yang ada (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan upah buruh) menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Hal ini berbanding terbalik dengan IDG kabupaten/kota yang justru meningkat, baik dalam indeks keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan kontribusi perempuan dalam pendapatan.

**Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pelembagaan gender di tingkat pengelola pembangunan sehingga komitmen pemerintah tentang kesetaraan gender dapat diwujudkan.** Penguatan kapasitas kelembagaan gender melalui POKJA Gender di Sulawesi Tenggara belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah pergeseran jabatan/mutasi yang tidak sejalan dengan penguatan kapasitas pejabat terkait, sehingga hasil pelatihan eksekutif dan teknis belum dapat tercermin dalam perencanaan anggaran daerah secara konsisten di semua urusan. Akibatnya masih banyak anggaran belanja

urusan atau sektor yang belum responsif gender, sehingga kecukupan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini masih menjadi tantangan.

**Selain penguatan kelembagaan, rendahnya ketersediaan database gender (data terpilah menurut jenis kelamin) juga menyumbang pada sulitnya pembuatan anggaran yang responsif gender.** Padahal kelengkapan data terpilah ini dapat mendorong lahirnya kebijakan, program, kegiatan dan proyek yang memastikan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini terpenuhi secara merata dan sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda. Untuk ini diperlukan kegiatan khusus di setiap urusan, untuk melakukan pendataan dan pencatatan informasi secara lebih terperinci dan terpilah, serta sistematis.